

## **PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL**

Siti Atika Rahmi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: [rantikajelita@yahoo.co.id](mailto:rantikajelita@yahoo.co.id)

***Abstract:** Policy framework related with the regional autonomy is formulating and implementing independent policies to be strategic. During decades, the development patterns have been more using centralism, which is fail to put the elements of sustainable economic development. The development format at the Era of regional autonomy has a bigger authority to fix and control development strategy properly with the regional potencies. One of governmental concerns is policy on the development tourism potential which was lead to involve the government, society, and private sectors. The main priority in such development is always connected with tourism objects and attractions. That effort is to harmonize the supporting factors, such as facilities and infrastructures. A now on development potency is cultural potential and local wisdom.*

***Key words:** tourism; development; local wisdom*

**Abstrak:** Kerangka kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah adalah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara mandiri menjadi sangat strategis. Selama beberapa dekade, pola pembangunan lebih banyak menggunakan pendekatan sentralistis yang terbukti gagal meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Format pembangunan pada era Otonomi Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menetapkan dan mengontrol strategi pembangunan yang sesuai dengan potensi daerah. Salah satu aspek perhatian Pemerintah adalah kebijakan pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata yang selalu diarahkan untuk melibatkan berbagai pihak, baik Pemerintah, masyarakat maupun kalangan dunia usaha. Prioritas utama dalam upaya pembangunan sektor ini selalu dihubungkan dengan objek dan daya tarik wisata. Upaya tersebut untuk menselaraskan faktor-faktor pendukung, yang antara lain sarana dan prasarana penunjang sebagai salah satu sektor unggulan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan saat ini ialah potensi budaya atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

**Kata kunci:** pariwisata; pembangunan; kearifan lokal

### **PENDAHULUAN**

Dalam Skala Nasional, pembangunan sektor pariwisata telah dituangkan dalam berbagai kebijakan Pemerintah. Kebijakan pembangunan sektor pariwisata mulai dimasukkan dalam undang-undang, keputusan presiden dan peraturan daerah. Sektor pariwisata masih dijadikan sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat diandalkan untuk pengembangan ekonomi. Untuk itu, maka pengembangan pariwisata dilakukan melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, sosial-budaya, hemat energi, pelestarian alam dan lingkungan.

Setiap merumuskan kebijakan, Pemerintah harus memperhatikan berbagai hal diantaranya kehidupan masyarakat setempat. Dengan melihat kehidupan masyarakat setempat, utamanya masyarakat yang masih kental dengan hukum adat sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Secara Geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya luas dengan kekayaan alam dan kultur yang unik, berupa aset-aset pariwisata yang tersebar pada seluruh Nusantara. Keberadaan seluruh aset merupakan potensi pariwisata yang dapat mendatangkan devisa bagi Negara, terutama masyarakat setempat. Melihat fungsinya yang konstruktif bagi bangsa dan masyarakat setempat, maka pariwisata perlu memiliki konsep dan definisi yang jelas.

Bryant and White (dalam Suryono, 2010:2) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu: (1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*). (2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*). (3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*). (4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*). (5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*). Lima prinsip dasar pembangunan di atas harus berorientasi pada pembangunan yang berwawasan *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat), yang berarti adanya proses pembangunan dengan tujuan peningkatan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya (Suryono, 2010:3).

Pariwisata ialah suatu proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan di luar tempat tinggalnya, baik perorangan maupun kelompok. Pariwisata diadakan karena berbagai kepentingan seperti kepentingan budaya, sosial, agama atau kepentingan yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan, serta memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Sementara itu, orang atau kelompok yang mengadakan perjalanan disebut wisatawan jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau tujuan wisata tetapi jika lama tinggalnya dalam waktu kurang dari 24 jam disebut pelancong (Suwanto, 1997:3).

Menurut Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata ialah berbagai

macam kegiatan wisata dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban di dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan isi Undang–Undang No. 10 Tahun 2009:

- (a) Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- (b) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- (c) Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- (d) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Perjalanan wisata dapat terjadi dengan tersedianya sumberdaya yang dapat menarik wisatawan. Sumberdaya pariwisata menurut Pitana (2009:69-75), terdiri atas: sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya budaya dan sumberdaya minat khusus. Sumberdaya alam yang dapat menjadi sumberdaya pariwisata menurut Fannel, yang dikutip oleh Pitana (2009:76) seperti: lokasi geografis, iklim dan cuaca, topografi dan *landforms*, *surface materials*, air, vegetasi, fauna. Sumberdaya manusia dalam pariwisata merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam pembangunan pariwisata. Faktor sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata. Sumberdaya budaya dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisatanya.

Salah satu jenis pariwisata yang menggunakan sumberdaya budaya sebagai modal utama dalam atraksi wisata disebut pariwisata budaya. Pariwisata budaya memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk melakukan kontak langsung dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang sesuatu objek budaya. Jenis pariwisata ini memberikan variasi yang luas menyangkut budaya, mulai dari seni pertunjukkan, seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah, pengalaman nostalgia dan cara hidup yang lain. Pariwisata saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia modern karena kemajuan dari teknologi, serta informasi yang terus mengalami perkembangan. Artikel ini membahas pembangunan pariwisata dalam perspektif kearifan lokal sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke suatu destinasi.

**PEMBAHASAN**

Pembangunan pariwisata hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat di sekitar destinasi. Selain itu, pembangunan pariwisata hendaklah berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kesiapan suatu destinasi di dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukanlah otoritas manajemen yang mencakup keseluruhan fungsi pengelolaan terhadap elemen–elemen pembentuk suatu destinasi. Hal ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Pengembangan produk, untuk mengembangkan produk destinasi agar dapat memberikan kualitas produk wisata yang mempunyai ciri khas tersendiri dan dapat menarik kunjungan wisatawan.
2. Pengembangan pemasaran, seperti promosi destinasi, penyediaan informasi kepariwisataan yang jelas dan efektif.
3. Pengembangan lingkungan, seperti penyediaan infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia.

Kebijakan sosial berasal dari nilai–nilai, kenyataan dan teori–teori sosial (Nugroho, 2014:1). Studi kebijakan sosial telah dikembangkan oleh para akademisi dan praktisi dari Barat. Fokus dari studi tersebut ialah pemecahan masalah sosial yang berbeda dengan fokus studi di Negara Berkembang. Kebijakan sosial di Negara Berkembang didesain untuk memecahkan masalah, serta untuk melakukan pembangunan sosial (Nugroho, 2014:11). Pembangunan sosial merupakan pembangunan ke arah pembangunan manusia, keadilan sosial dan ke arah kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial tidak hanya mengenai kemiskinan, tapi juga tentang pengembangan kualitas masyarakat yang kurang berpendidikan agar menjadi lebih terdidik.

Pembangunan sosial dengan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial sangat bergantung pada modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Pengelompokan sumber modal sosial secara garis besar dibedakan atas tiga kelompok utama (Vipriyanti, 2011:13), yaitu: rasa percaya, norma dan jaringan kerja. Rasa percaya merupakan dasar dari perilaku moral ketika akan membangun modal sosial. Rasa percaya ditentukan oleh *homogeneity*, yang merupakan komposisi populasi dan tingkat ketidaksamaan (*inequality*). Norma adalah nilai bersama yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat atau kelompok. Jaringan kerja pada awalnya merupakan sistem dari saluran komunikasi (*system of communication channel*) untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal.

Modal sosial dapat dilihat sebagai perekat yang dapat menyatukan masyarakat, serta menjalin hubungan–hubungan antarmanusia. Bagian dari membangun modal sosial ialah memperkuat “masyarakat madani”. “Masyarakat madani” merupakan istilah yang digunakan untuk struktur–struktur formal atau semi-formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela, tanpa arahan [www.jurnal.unitri.ac.id](http://www.jurnal.unitri.ac.id)

tertentu dari Pemerintah. “Masyarakat madani” terdiri atas sektor non-pemerintah dan perusahaan, akan tetapi sektor madani lebih luas dari itu. Contoh dari “masyarakat madani” ialah organisasi sosial, grup kebudayaan, perkumpulan pemuda dan seterusnya (Ife, 2014:35-36).

Kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial yang pada gilirannya bisa membentuk kebudayaan kembali dan memperkenalkan perubahan-perubahan yang kemudian menjadi bagian dari warisan generasi berikutnya. Kebudayaan adalah sistem norma dan nilai, sedangkan masyarakat ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama dan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Masyarakat merupakan wadah atau organisasi manusia yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Kebudayaan ialah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi dan menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut (Horton, 1984:58-59).

Globalisasi budaya sudah mengikuti pola yang sama seperti globalisasi ekonomi yang telah terjadi saat ini. Budaya *universal* berkembang karena disebarluaskan melalui media global yang semakin maju dan canggih. Di dalam menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka dan menjadikannya keunikan wilayah. Meski demikian, globalisasi budaya merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip yang ingin ditekankan adalah bahwa keanekaragaman budaya perlu dipertahankan. Oleh karena itu, budaya yang memberikan identitas dan rasa memiliki kepada orang-orang sehingga pengembangan budaya menjadi sangat penting bagi masyarakat (Ife, 2014:447-448).

Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya menurut Ife (2014:449-464) terdiri atas empat komponen, yaitu:

1. Melestarikan dan Menghargai Budaya lokal. Tradisi budaya lokal merupakan bagian yang penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat, serta memberikan identitas kepada masyarakat. Masyarakat perlu mengidentifikasi apa komponen yang unik dari warisan budayanya, serta menentukan komponen mana yang ingin dipertahankan. Semua itu membutuhkan perencanaan yang tersusun, serta bagaimana mencapainya. Misalnya, membangun industri lokal yang berbasis budaya lokal.
2. Melestarikan dan Menghargai Budaya Asli. Melestarikan dan menghargai budaya orang-orang pribumi merupakan isu sentral untuk pengembangan masyarakat. Masyarakat pribumi atau asli yang anggotanya mendominasi dan karena itu masyarakat diidentifikasi, serta kasus orang-orang pribumi yang tergolong sebagai sebuah masyarakat beserta orang-orang yang latar belakang budayanya berbeda.
3. Multikulturalisme. Pada umumnya, multikulturalisme merujuk pada kelompok etnis yang berbeda yang tinggal di suatu masyarakat tetapi mempertahankan identitas budaya yang berbeda. Isu kebijakan multikultural dan politik sangatlah kompleks, akan tetapi

keanekaragaman latar belakang budaya merupakan realitas bagi banyak masyarakat. Oleh sebab itu, multikulturalisme merupakan aspek yang penting dari pembangunan budaya masyarakat.

4. Budaya Partisipatif. Hal ini telah menjadi fokus dari banyak program pengembangan budaya masyarakat. Partisipasi budaya dilihat sebagai cara penting untuk membangun modal sosial, memperkuat masyarakat dan menegaskan identitas.

Pariwisata dan kebudayaan menurut Selo Soemarjan (dalam Spillane, 1989:50) berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang berdampak terhadap bidang sosial dan budaya. Dampak yang ditimbulkan ada yang positif dan ada yang negatif. Biasanya dampak positif tidak hanya menarik perhatian banyak orang, mungkin karena dianggap sudah sewajarnya dalam usaha masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Sebaliknya, akibat yang negatif dapat menimbulkan kritik bahkan lebih ekstrim dapat menimbulkan reaksi dan tindak kekerasan dari berbagai golongan dalam masyarakat. Peran pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu: segi ekonomis, segi sosial dan segi kebudayaan (Spillane, 1989:54).

Ada beberapa benang merah pengembangan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, penerapan strategi perluasan kesempatan berusaha bagi kalangan miskin di sekitar kawasan pariwisata. *Kedua*, perluasan kesempatan kerja bagi penduduk lokal. *Ketiga*, pencegahan degradasi mutu lingkungan yang berdampak langsung dan lebih rentan bagi masyarakat. *Keempat*, penekanan pada upaya meminimalkan dampak sosial budaya pariwisata. *Kelima*, pendampingan masyarakat lokal untuk pengembangan bisnis inti dan pendukung pariwisata. *Keenam*, promosi organisasi lokal yang dibentuk untuk kepentingan pariwisata (Damanik, 2013:10-12).

Daya tarik pariwisata budaya belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik. Budaya etnik dan peninggalan sejarah, misalnya seringkali dipandang sebagai inti daya tarik pariwisata budaya. Dalam kajian akademik muncul terminologi baru seperti *heritage tourism*, yang dalam terminologi bahasa Indonesia hampir tidak berbeda dengan pariwisata budaya (*cultural tourism*). Kemudian, para ahli memperluas cakupan pariwisata budaya dengan memasukkan sejumlah *events* budaya sebagai aktivitas utamanya (Damanik, 2013:109).

Wisatawan yang terlibat dalam pariwisata budaya memiliki sejumlah tipologi yang berbeda dengan tipologi segmen pasar wisatawan lainnya menurut McKercher (dalam Damanik, 2013:110). Tipologi pariwisata tersebut dapat diidentifikasi ke dalam lima tipologi berikut:

1. *“The purposeful cultural tourist”* atau wisatawan yang semata-mata bertujuan untuk menikmati atraksi dan mempelajari budaya sebagai alasan untuk melaksanakan perjalanan wisata.

2. *“The sightseeing cultural tourist”* atau wisatawan yang ingin menikmati warisan budaya lain sebagai alasan utama perjalanan, akan tetapi ia lebih berorientasi pada pencarian pengalaman kesenangan daripada pemahaman yang lebih dalam atas budaya tersebut.
3. *“The casual cultural tourist”* atau wisatawan yang ingin menikmati warisan budaya lain secara terbatas sebagai alasan melakukan perjalanan wisata dan di destinasi tersebut mereka hanya sekedar mengunjungi atraksi secara sekilas.
4. *“The incidental cultural tourist”* atau wisatawan yang tidak menjadikan budaya sebagai penentu dalam proses keputusan berwisata, namun ketika berada di destinasi mereka juga mengunjungi atraksi–atraksi budaya.
5. *“The serendipitous cultural tourist”* atau wisatawan yang tidak menjadikan budaya sebagai penentu dalam proses keputusan berwisata. Namun, ketika berada di destinasi mereka juga mengunjungi atraksi budaya dan memperoleh pengalaman berharga di sana.

Kearifan lokal dan keunggulan lokal menurut Suryono (2010:14) ialah kebijaksanaan manusia yang berdasarkan filosofi nilai–nilai, etika, cara–cara dan perilaku yang telah berlaku sejak dahulu. Bentuk–bentuk kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat ialah nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, serta aturan–aturan khusus yang berlaku di masyarakat dengan fungsi yang bermacam pula. Beberapa fungsi kearifan lokal, antara lain:

1. Sebagai bentuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam,
2. Pengembangan sumberdaya manusia,
3. Digunakan untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan,
4. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan,
5. Mempunyai makna sosial, contohnya upacara yang dilaksanakan pada tahap menanam padi,
6. Mempunyai makna etika dan moral, serta
7. Bermakna politik atau hubungan kekuasaan.

Daya tarik wisata budaya merupakan salah satu nilai unggul yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Sunaryo (2013:26), daya tarik wisata budaya ialah daya tarik wisata yang pengembangannya berdasarkan pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik itu berupa peninggalan budaya maupun nilai budaya yang masih hidup dalam kehidupan suatu masyarakat. Contoh daya tarik wisata budaya ialah upacara atau ritual, adat-istiadat, seni pertunjukan dan lain sebagainya. Karakteristik wisata budaya dari suatu daerah memiliki peran yang sangat menentukan dalam menyerap dampak dari destinasi pariwisata suatu daerah. Wisata budaya yang memiliki karakteristik yang lain daripada yang lain merupakan nilai unggul yang dapat dijadikan kekuatan dalam menarik wisatawan lebih banyak lagi.

Ada beberapa karakteristik unggul dari industri pariwisata yang membuat industri ini mampu berperan sebagai keunggulan kompetitif bagi pembangunan daerah, yakni:

1. Sektor pariwisata ialah salah satu industri yang memiliki keterkaitan nilai (*multiplier effects*) yang sangat panjang dan mampu menjalin sinergi pertumbuhan dengan berbagai usaha mikro termasuk kegiatan *home industry*.
2. Usaha yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata dapat menyerap tenaga kerja sumberdaya setempat (*local resources based*) dan yang paling penting berbahan baku yang relatif tidak pernah habis atau terbaharui (*renewable resources*).
3. Tidak adanya *over supply* dalam industri pariwisata karena mempunyai karakteristik produk yang khas dan relatif tidak dipengaruhi oleh adanya situasi resesi/krisis ekonomi pada suatu negara.

Kemajuan teknologi, serta pengaruh globalisasi saat ini sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat dunia. Giddens (1994:5) menjelaskan globalisasi merupakan seperangkat proses yang kompleks yang sering bertentangan dan terkadang kontradiktif. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi perubahan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga bagaimana cara untuk aktivitas lokal dapat mempengaruhi masyarakat tingkat global (Ife, 2014:378). Menghubungkan antara tingkat global dapat mempengaruhi tingkat lokal atau sebaliknya, bagaimana tingkat lokal berpengaruh terhadap kehidupan global menjadi tantangan besar bagi pengembangan masyarakat.

Pariwisata budaya sebagai sebuah daya tarik wisata menurut Damanik (2013:109) harus mempunyai keunikan tempat atau lokasi yang dapat memberikan sebuah pengalaman yang berbeda, serta terciptanya citra menarik bagi tradisi, latar belakang etnik dan lanskap destinasi. Setiap produk budaya mempunyai potensi untuk dikemas sesuai kebutuhan pengembangan pariwisata budaya dan juga memiliki nilai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang paling penting ialah terjaganya kelestarian lingkungan, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi.

Beberapa pakar di bidang analisis dampak lingkungan dari aktivitas kepariwisataan seperti Alistair Matchieoson dan Geoffrey Wall, yang dikutip dalam Sunaryo (2013:53-54) menguraikan bahwa prinsip dari model pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berintikan pengukuran kinerja pembangunan kepariwisataan dengan beberapa aspek indikator penting:

1. Aspek indikator lingkungan fisik yang memerlukan pengamatan dan pengukuran secara periodik ada dua yaitu pertama yang bersifat *fixed* terdiri atas sumberdaya alam/ekologi bukan buatan manusia, seperti: lanskap, hutan, danau, ketersediaan air tanah, polusi udara,

terumbu karang, flora dan fauna dan seterusnya. Kedua, yang bersifat *flexible* berupa buatan manusia, contohnya: sistem infrastruktur, transportasi dan lainnya.

2. Aspek indikator sosial budaya yang harus selalu dimonitor kondisi dan kapasitasnya ialah
  - (a) Jumlah wisatawan dan tipe kegiatan rekreasi, serta perilaku wisatawan yang terserap oleh destinasi tanpa harus mempengaruhi identitas, gaya hidup dan kehidupan sosial budaya;
  - (b) Pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
  - (c) Memberikan kontribusi terhadap konservasi sumberdaya alam dan *cultural heritage*;
  - (d) Memberikan nilai kepada wisatawan terhadap hubungannya dengan masyarakat lokal, kearifan lokal, isu-isu sosial dan lingkungan setempat;
  - (e) Meminimalkan dampak negatif ekonomi, lingkungan, budaya dan sosial dari pengembangan pariwisata;
  - (f) Menumbuhkan hubungan baik antara wisatawan dengan masyarakat sekitar destinasi.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan pariwisata merupakan kerangka atau model yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan industri pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Salah satu daya tarik itu ialah kearifan lokal dari sebuah destinasi yang memiliki nilai lebih dan menarik bagi wisatawan yang akan berkunjung. Kearifan lokal atau budaya yang ada hendaknya memiliki nilai lebih tanpa harus mengurangi atau menambah nilai dari budaya tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Damanik, Phil Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Giddens, A. 1994. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pitana, I Gede & I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Spillane, James. 1989. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Vipriyanti, Nyoman Untari. 2011. *Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah Mengkaji Success Story Pembangunan di Bali*. Malang: UB Press.